KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ambil Alih FIR Kepri dari Singapura Segera!
Tanggal : Selasa, 18 Desember 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ambil Alih FIR Kepri Dari Singapura Segera!

KETUA DPR Bambang Soesatyo mendesak Pemerintah segera mengambil alih Flight Information Region (FIR) wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dari tangan Singapura. Pengambilalihan tersebut penting sebagai bentuk kedaulatan udara Indonesia dan juga pelaksanaan amanah UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.

FIR wilayah Kepri dipegang Singapura sejak 1946. Kemudian, penguasaan ini diperpanjang melalui perjanjian tahun 1995 antara Indonesia dengan Singapura. Akibatnya, seluruh pesawat yang terbang di langit Kepri harus izin ke otoritas Singapura.

"DPR mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi perjanjian antara Indonesia dengan Singapura tahun 1995 yang pemberian wewenang pengontrolan sebagian ruang udara kedaulatan NKRI ke negara tersebut. Sebab, hal tersebut terkait dengan isu pertahanan, kedaulatan ekonomi, dan hukum di Indonesia," ucap Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, di Jakarta, kemarin.

Presiden Jokowi sudah mengeluarkan arahan untuk pengambialihan FIR ini sejak 8 September 2015. TNI AU juga menyatakan sudah siap mengelola pengontrolan ruang udara di Kepri. Namun, proses pengambilalihan memang alot.

Bamsoet pun mendesak Kementerian Koordinator Kemaritiman bergerak cepat membuat road map untuk pengambilalihan FIR itu. Tidak boleh berlama-lama. Dalam waktu dekat, FIR Kepri harus kembali ke tangan Indonesia.

"DPR juga mendorong Kemenko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri melakukan kajian mendalam terkait FIR. Sebab, itu merupakan kedaulatan negara," tegasnya.

Hasil kajian dan analisa selama ini, tambah Bamsoet, menunjukkan penguasaan FIR oleh Indonesia lebih menguntungkan. Makanya, Pemerintah harus gerak cepat. Diplomasi yang intens dengan Pemerintah Singapura perlu dilakukan.

Bamsoet memastikan, DPR juga bakal membantu. Makanya, dia meminta Pemerintah juga menyerahkan hasil kajian pengambilalihan FIR itu ke DPR. "Kami mendoorng Kemenko Polhukam untuk memberikan hasil kajian tersebut ke Komisi I DPR dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR (BKSAP) sebagai bahan diplomasi parlemen," tandasnya. ■ ONI